

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu indikator penting yang dijadikan sebagai alat untuk menilai kualitas layanan pendidikan adalah kepuasan siswa. Kepuasan siswa mencerminkan sejauh mana proses pembelajaran di sekolah, lingkungan sekolah, dan pelayanan pendidikan sesuai dengan harapan peserta didik. Dalam konteks manajemen mutu pendidikan, kepuasan siswa tidak hanya dipahami sebagai respons afektif terhadap pengalaman belajar, tetapi juga sebagai refleksi dari efektivitas layanan yang disediakan sekolah, meliputi aspek akademik maupun nonakademik (Sitorus et al., 2023). Tingginya tingkat kepuasan siswa dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memperkuat hubungan antara peserta didik dan sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan.

Meskipun demikian, berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan siswa masih menghadapi sejumlah permasalahan. Temuan penelitian di beberapa satuan pendidikan dasar dan menengah memperlihatkan bahwa fasilitas dan sarana pendukung pembelajaran belum sepenuhnya memadai, sehingga berpengaruh pada kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar siswa. Pada waktu pembelajaran jarak jauh, misalnya, mutu layanan akademik di sejumlah sekolah menurun dan berdampak pada kepuasan siswa yang hanya berada dalam kategori “cukup” (Indarti et al., 2021). Selain itu, perbedaan antara harapan dan persepsi siswa dalam menilai kualitas layanan pendidikan, baik terkait penyampaian materi, manajemen sekolah, maupun pelayanan administratif, menunjukkan adanya aspek pelayanan yang belum maksimal untuk memenuhi standar mutu yang diharapkan siswa (Khusaeni, 2016).

Di samping persoalan sarana prasarana dan layanan akademik, aspek nonakademik seperti layanan bimbingan dan konseling serta kualitas interaksi interpersonal juga berkontribusi terhadap kepuasan siswa. Beberapa penelitian melaporkan bahwa layanan konseling di sekolah belum mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap kebutuhan psikologis maupun perkembangan

karier siswa (Suprihatin, 2018). Kualitas pelayanan guru dan citra lembaga pendidikan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepuasan siswa. Apabila mutu layanan, komunikasi, dan bimbingan yang diberikan guru belum maksimal, siswa cenderung memiliki persepsi negatif terhadap pengalaman belajar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan siswa merupakan aspek holistik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, pedagogis, dan sosial di lingkungan sekolah.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), yang berisi "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat mengajaran.*" (Undang-Undang Dasar, 1945). Pendidikan merupakan faktor penting dan menjadi kunci utama bagi kemajuan bangsa. Dalam upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan akses pendidikan, pemerintah Indonesia terus melaksanakan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan. Salah satu kebijakan penting yang menjadi tonggak pemerataan kesempatan belajar adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak usia sekolah mendapatkan peluang yang sama untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, sekaligus menghapus praktik-praktik diskriminatif dalam proses penerimaan siswa (Setiawan et al., 2019).

Awal penerapan kebijakan zonasi secara nasional dilakukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha meminimalkan kesenjangan kualitas antar sekolah, mendorong pemerataan guru dan sarana prasarana, serta memperkuat peran sekolah sebagai pusat kegiatan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Seiring dengan pelaksanaannya, kebijakan ini terus mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat (Permendikbud, 2017). Penyempurnaan tersebut antara lain diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang menekankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sistem zonasi kini tidak hanya berfokus pada pembagian wilayah, tetapi juga

memperhatikan faktor afirmasi bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, maupun karena mutasi tugas orang tua, serta jalur prestasi akademik atau nonakademik (Permendikbud, 2021).

Dengan diterapkannya kebijakan PPDB berbasis zonasi, diharapkan tidak ditemukan lagi sekolah yang dianggap "unggulan" hanya karena faktor lokasi atau seleksi akademik, melainkan semua sekolah dapat menjadi tempat belajar yang berkualitas. Kebijakan ini sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam pemerataan mutu pendidikan di wilayahnya, sehingga tujuan besar pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum dapat terwujud secara utuh (Muiz et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem zonasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural, sosial, maupun teknis yang cukup kompleks. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan tujuan awalnya untuk menciptakan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Syakarofath et al. (2020) menemukan bahwa meskipun sistem zonasi mampu memperluas kesempatan belajar bagi siswa di sekitar lingkungan sekolah, masih terdapat perbedaan kualitas antar sekolah yang relatif tinggi. Sekolah-sekolah yang sebelumnya berstatus "favorit" tetap diminati masyarakat karena memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang lebih baik, sedangkan sekolah di wilayah tertentu masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan kualitas pembelajaran (Joko et al., 2020). Kondisi ini memunculkan resistensi masyarakat, terutama ketika penempatan siswa dianggap "tidak sesuai harapan" atau "tidak strategis" bagi perkembangan akademik anak.

Sementara itu, Akhyar (2024) menyoroti aspek sosialisasi kebijakan yang dinilai belum optimal, khususnya di wilayah perkotaan padat penduduk. Banyak orang tua dan calon peserta didik belum memahami sepenuhnya mekanisme dan tujuan dari sistem zonasi, sehingga muncul persepsi ketidakadilan serta anggapan bahwa kebijakan ini mengabaikan prestasi akademik sebagai indikator utama seleksi. Kurangnya pemahaman ini sering menimbulkan konflik sosial, seperti protes orang tua, manipulasi alamat, hingga meningkatnya tekanan terhadap

sekolah-sekolah yang berada di zona dengan permintaan tinggi. Di sisi lain, Yenti & Utami (2024) menegaskan bahwa meskipun sistem zonasi telah berhasil memperluas akses pendidikan formal bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial, namun pemerataan mutu pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya guru yang masih tinggi antar sekolah di berbagai daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan akses pendidikan belum otomatis sejalan dengan kesetaraan kualitas pendidikan. Ketika siswa ditempatkan di sekolah berdasarkan jarak domisili, bukan lagi prestasi akademik, maka komposisi peserta didik menjadi semakin beragam dari segi kemampuan, latar belakang sosial ekonomi, serta motivasi belajar. Keberagaman ini dapat menjadi potensi bagi penguatan nilai inklusivitas dan solidaritas sosial, namun juga menimbulkan tantangan baru bagi satuan pendidikan dalam menyesuaikan strategi pembelajaran.

Guru perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan dan karakter siswa. Hal ini menuntut penguatan kompetensi guru dalam pembelajaran diferensiasi, manajemen kelas, dan evaluasi formatif yang adaptif terhadap kondisi peserta didik (Munawir et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan sistem zonasi tidak hanya bergantung pada mekanisme administratif penerimaan peserta didik, tetapi juga pada kemampuan sekolah dan pendidik dalam mengelola keberagaman serta meningkatkan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Dalam konteks Sekolah Menengah Pertama (SMP), interaksi guru dan siswa memiliki peran yang sangat strategis untuk membentuk pengalaman belajar, motivasi, serta kepuasan siswa terhadap proses pendidikan. Interaksi yang efektif bukan sekadar proses penyampaian materi pelajaran, melainkan suatu bentuk komunikasi dua arah yang melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan sosial (Syifurrahmah et al., 2025). Guru memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan membimbing potensi setiap siswa.

Dalam kerangka teori sosiokultural Vygotsky (1978), proses pembelajaran dipandang sebagai aktivitas sosial yang menekankan pentingnya interaksi sosial

bermakna dalam mendukung perkembangan kognitif siswa. Konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD) menjelaskan bahwa perkembangan intelektual seorang anak terjadi ketika ia terlibat dalam kegiatan belajar bersama orang yang lebih kompeten, yang memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dengan demikian, kualitas interaksi antara guru dan siswa menjadi faktor utama bagi tercapainya perkembangan optimal, karena di dalamnya terjadi proses bimbingan, dialog, dan negosiasi makna yang memperkaya pengalaman belajar.

Hasil penelitian Mukroni (2017) menunjukkan bahwa mutu pembelajaran guru, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan siswa. Guru yang mampu merancang pembelajaran menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa cenderung menghadirkan suasana belajar yang kondusif dan nyaman. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Khusaeni (2016) yang menegaskan bahwa mutu pelayanan pendidikan dan citra lembaga memiliki hubungan erat dengan kepuasan dan loyalitas siswa. Hal ini menunjukkan bahwa citra positif lembaga pendidikan dapat dilihat dari kualitas pengalaman belajar yang dibangun oleh guru dan siswa.

Dalam konteks kebijakan zonasi, peran interaksi guru-siswa menjadi semakin penting. Kebijakan ini menyebabkan komposisi peserta didik di sekolah menjadi lebih heterogen dari segi kemampuan akademik, latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan motivasi belajar (Widyastuti, 2020). Keberagaman tersebut menuntut guru untuk memiliki kompetensi pedagogik dan sosial yang adaptif, agar mampu membangun interaksi yang inklusif, empatik, dan memberdayakan seluruh siswa tanpa diskriminasi. Interaksi yang positif dapat meningkatkan hasil belajar, juga memperkuat rasa memiliki siswa terhadap sekolah, yang kemudian meningkatkan kepuasan dan keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar.

Namun demikian, terdapat berbagai tantangan kontekstual dalam mewujudkan interaksi efektif tersebut. Di sekolah dengan jumlah siswa yang besar, guru sering kali kesulitan memberikan perhatian personal dan umpan balik individual, karena keterbatasan waktu dan rasio guru-siswa yang tidak seimbang (Rinja & Ningsih, 2020). Kondisi ini dapat menurunkan intensitas komunikasi interpersonal serta mengurangi kedekatan emosional antara guru dan peserta didik. Sebaliknya, di

sekolah dengan jumlah siswa relatif sedikit, keterbatasan fasilitas, media pembelajaran, dan sumber daya pendidikan sering kali menghambat terciptanya proses belajar yang menarik dan bervariasi, sehingga dapat berpengaruh terhadap motivasi dan kepuasan siswa terhadap layanan pendidikan.

Dengan demikian, variasi konteks sekolah yang muncul akibat penerapan kebijakan zonasi berpotensi mempengaruhi intensitas, kualitas, dan pola interaksi guru-siswa. Interaksi yang kurang optimal dapat menurunkan persepsi siswa terhadap mutu pembelajaran dan kepuasan belajar, sedangkan interaksi yang hangat, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa justru dapat menjadi kompensasi bagi keterbatasan sumber daya sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas interaksi guru-siswa perlu menjadi fokus utama dalam penguatan implementasi kebijakan zonasi, melalui pelatihan guru, penguatan supervisi akademik, serta pengembangan budaya sekolah yang mendukung komunikasi terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta didik.

Kota Bogor menjadi lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji fenomena implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi, karena memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial yang kompleks. Kota ini merupakan salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Jakarta, dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta tingkat urbanisasi yang pesat (Pemerintah Daerah Kota Bogor, 2025). Kondisi ini menyebabkan persebaran penduduk tidak merata antar wilayah, sehingga berdampak langsung pada distribusi peserta didik dan daya tampung sekolah di berbagai kecamatan.

Berdasarkan data Dapodik Kemendikbudristek Tahun 2025/2026, tercatat terdapat 123 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bogor, yang terdiri dari 23 SMP negeri dan 100 SMP swasta. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Selatan, dan Tanah Sareal. Namun demikian, sebaran sekolah yang tidak merata masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan sistem zonasi (Dapodik, 2025). Kecamatan seperti Tanah Sareal dan Bogor Tengah memiliki konsentrasi penduduk yang padat dengan jumlah calon peserta didik yang tinggi, sementara

kecamatan lain memiliki rasio jumlah sekolah terhadap penduduk yang relatif lebih rendah.

Kondisi geografis dan kepadatan wilayah tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip pemerataan zonasi, baik dari segi pemerataan distribusi siswa, ketersediaan sarana-prasarana pendidikan, maupun kapasitas daya tampung sekolah. Di beberapa wilayah, daya tampung sekolah negeri masih terbatas, sehingga banyak siswa yang tidak diterima di sekolah terdekat dan akhirnya memilih sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi (Napitupulu, 2021). Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Data lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan kapasitas antar sekolah. Beberapa sekolah negeri populer seperti SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 5 Kota Bogor tercatat menampung hingga 1.000 siswa, jauh melampaui kapasitas ideal ruang belajar yang seharusnya. Sebaliknya, sejumlah sekolah lain, memiliki jumlah siswa yang lebih sedikit. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di Kota Bogor belum sepenuhnya menghasilkan distribusi siswa yang proporsional antar sekolah, sehingga kualitas pengalaman belajar siswa dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kapasitas sekolah tempat mereka diterima.

Perbedaan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fisik seperti rasio siswa terhadap ruang kelas atau fasilitas pembelajaran, tetapi juga pada kualitas interaksi interaksi guru-siswa. Di sekolah dengan jumlah siswa yang besar, guru menghadapi kesulitan dalam memberikan pendampingan personal kepada setiap peserta didik, sehingga potensi interaksi bermakna menjadi terbatas. Sebaliknya, di sekolah dengan jumlah siswa lebih sedikit, keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung sering kali menghambat terciptanya lingkungan belajar yang dinamis dan inovatif. Dalam konteks ini, peran guru dan kualitas interaksi pembelajaran menjadi faktor kunci untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan belajar siswa, terlepas dari kondisi fisik maupun status sekolah. Guru diharapkan mampu menyesuaikan strategi pedagogisnya agar mampu menjawab keberagaman kemampuan dan kebutuhan siswa hasil kebijakan zonasi.

Kajian mengenai sistem zonasi dalam PPDB telah banyak dikaji, namun mayoritas berfokus pada aspek kebijakan makro, seperti efektivitas pemerataan akses pendidikan, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap distribusi siswa antar sekolah. Penelitian-penelitian tersebut penting untuk menilai keberhasilan kebijakan dalam konteks pemerataan kesempatan belajar, tetapi belum banyak yang mengkaji implikasi zonasi terhadap dinamika pembelajaran di tingkat mikro, terutama pada faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman siswa di sekolah. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk meneliti bagaimana kebijakan zonasi berdampak secara nyata terhadap proses belajar dan persepsi siswa terhadap kualitas layanan pendidikan.

Sementara itu, penelitian mengenai interaksi guru-siswa umumnya berfokus pada motivasi, keterlibatan, atau hasil belajar, bukan pada kepuasan siswa sebagai indikator subjektif kualitas pengalaman belajar. Padahal, kepuasan siswa merupakan variabel penting dalam menilai efektivitas proses pendidikan karena mencerminkan tingkat penerimaan siswa terhadap lingkungan belajar, interaksi sosial, dan layanan pendidikan yang diterimanya. Dalam konteks kebijakan zonasi, di mana latar belakang dan kemampuan siswa menjadi semakin beragam, penting untuk memahami sejauh mana interaksi guru-siswa mampu memengaruhi kepuasan siswa dalam situasi pembelajaran yang heterogen.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh sistem zonasi PPDB dan interaksi guru-siswa terhadap kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh data empiris yang terukur dan objektif, sehingga dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel secara sistematis dan dapat diuji secara statistik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan berbasis data mengenai bagaimana kebijakan pendidikan nasional di tingkat makro berimplikasi pada praktik pembelajaran di tingkat mikro, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi peningkatan mutu pendidikan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kualitas pengalaman belajar siswa.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang mendasari pentingnya penelitian terkait pengaruh sistem zonasi PPDB dan interaksi guru-siswa terhadap kepuasan siswa. Berikut identifikasi masalah yang ditemukan:

1. Penerapan sistem zonasi PPDB di Kota Bogor belum sepenuhnya berjalan efektif, karena masih terdapat sekolah dengan daya tampung melebihi kapasitas sementara sekolah lain kekurangan siswa.
2. Ketimpangan fasilitas antar sekolah negeri menyebabkan hasil zonasi belum sepenuhnya menciptakan peerataan mutu pendidikan.
3. Sosialisasi kebijakan zonasi kepada masyarakat belum merata, sehingga masih terdapat kesalahpahaman tentang mekanisme dan tujuan zonasi.
4. Kualitas interaksi guru-siswa di setiap sekolah berbeda, yang dapat memengaruhi persepsi siswa terhadap kenyamanan dan kualitas pembelajaran.
5. Guru menghadapi tantangan dalam proses belajar karna kemampuan dan latar belakang sosial siswa yang lebih heterogen akibat sistem zonasi.
6. Belum ada penelitian kuantitatif di Kota Bogor yang secara simultan menelaah hubungan antara pelaksanaan zonasi PPDB, interaksi guru-siswa, dan kepuasan siswa.
7. Data empirik mengenai tingkat kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor masih sangat terbatas.

## C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dilakukan pembatasan masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah diidentifikasi. Penelitian ini dibatasi pada efektivitas penerapan sistem zonasi PPDB SMP Negeri di Kota Bogor yang ditinjau dari kesenjangan daya tampung sekolah, perbedaan kualitas interaksi guru-siswa, serta keterbatasan data empiris mengenai tingkat kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran dan layanan sekolah.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, berikut rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh sistem zonasi PPDB terhadap kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor?
2. Bagaimana pengaruh interaksi guru-siswa terhadap kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor?
3. Bagaimana pengaruh sistem zonasi PPDB dan interaksi guru-siswa secara simultan terhadap kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor?

## E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh sistem zonasi PPDB terhadap kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor.
2. Menganalisis pengaruh interaksi guru-siswa terhadap kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor.
3. Menganalisis pengaruh sistem zonasi PPDB dan interaksi guru-siswa terhadap kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

### Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai hubungan kebijakan zonasi, interaksi guru-siswa, dan kepuasan siswa. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian *student well-being* dalam konteks pendidikan menengah di Indonesia.

### Kegunaan Praktis

1. Bagi sekolah: memberikan masukan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan kualitas interaksi guru-siswa.
2. Bagi dinas pendidik: menjadi bahan evaluasi kebijakan zonasi agar tidak hanya berfokus pada pemerataan akses, tetapi juga kepuasan siswa.
3. Bagi peneliti lain: menjadi rujukan untuk penelitian lanjut yang mengaitkan kebijakan pendidikan dengan kepuasan siswa.

## G. State of The Art

Kajian mengenai sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan interaksi guru-siswa telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks pendidikan,

baik di jenjang sekolah dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Secara umum, penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas kebijakan zonasi dalam pemerataan akses pendidikan, dan pada dampak kualitas interaksi guru terhadap pengalaman belajar siswa. Namun, penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh sistem zonasi dan interaksi guru-siswa terhadap kepuasan siswa masih relatif terbatas, terutama pada konteks Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tingkat daerah.

Sebagian besar penelitian kebijakan zonasi menyoroti aspek keadilan, aksesibilitas, dan persepsi masyarakat, sedangkan kajian tentang interaksi guru-siswa cenderung menitikberatkan pada motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Sementara, kepuasan siswa sebagai indikator hasil layanan pendidikan masih jarang digunakan sebagai variabel terikat (*dependent variable*) dalam kajian manajemen pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menggabungkan dua dimensi dalam menjelaskan tingkat kepuasan siswa SMP Negeri di Kota Bogor.

Untuk memperjelas posisi dan kontribusi penelitian ini, berikut ringkasan beberapa penelitian relevan dalam sepuluh tahun terakhir yang berhubungan dengan sistem zonasi, interaksi guru-siswa, dan kepuasan siswa:

Tabel 1 *State of the art*

No	Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian ini
1.	Syakarofath, N., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pengembangan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. <i>Kontra Penerapan Kebijakan Data Sekunder Dengan Analisis Deskriptif</i> .	Kuantitatif dengan analisis deskriptif	Zonasi memperluas akses pendidikan dan pemerataan siswa, tetapi menimbulkan ketidakpuasan siswa dan orang tua akibat perbedaan kualitas sekolah.	Menjadi dasar teoritis untuk memahami variabel sistem zonasi PPDB ( $X_1$ ) dan hubungannya dengan kepuasan siswa ( $Y$ ).
2.	Akhyar, Y. (2024). Implementasi	Kualitatif deskriptif	Pelaksanaan zonasi belum	Memperkuat konteks empiris

No	Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian ini
	Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru.	(observasi dan wawancara guru/siswa di Pekanbaru)	optimal karena sosialisasi dan fasilitas belum merata; persepsi siswa dan guru terhadap keadilan zonasi masih rendah.	bahwa implementasi zonasi memengaruhi persepsi dan kepuasan siswa terhadap sekolah.
3.	Friski, E., & Sabandi, A. (2024). Persepsi Siswa tentang Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.	Kuantitatif deskriptif (angket skala Likert pada siswa SMA)	Persepsi siswa terhadap pelaksanaan sistem zonasi dinilai “cukup baik” pada tahap pendaftaran, tetapi lemah pada tahap daftar ulang.	Memberikan indikator pelaksanaan zonasi PPDB (X <sub>1</sub> ) seperti pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan daftar ulang.
4.	Khusaeni, A. (2016). Kepuasan Siswa dan Loyalitas Siswa (Studi Empirik di SMK Negeri Rembang, Pasuruan, Jawa Timur).	Kuantitatif PLS-SEM dengan 200 responden siswa SMK	Kualitas pelayanan dan citra sekolah berpengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas siswa.	Memperkuat model konseptual bahwa kepuasan siswa (Y) merupakan <i>outcome</i> layanan pendidikan.
5.	Yenti, A., & Utami, M. (2024). Mengurai Tantangan dan Peluang PPDB	Kuantitatif deskriptif	Evaluasi kebijakan zonasi menunjukkan perlunya penyesuaian	Mendukung argumentasi tentang kesenjangan mutu antar zona

No	Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian ini
	Berbasis Zonasi : Menuju Pemerataan Pendidikan Berkualitas di Indonesia.		pemerataan mutu antarsekolah.	sebagai konteks penelitian.
6.	Mukroni, S. (2017). Pengaruh Kualitas Pembelajaran Guru Ekonomi terhadap Kepuasan Siswa di SMA Negeri 2 Sentajo Raya.	Kuantitatif korelasional (analisis regresi)	Kualitas pembelajaran guru (perencanaan, pelaksanaan, penilaian) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan siswa.	Menjadi rujukan utama untuk variabel interaksi gurusiwa ( $X_2$ ) dan kepuasan siswa ( $Y$ ).
7.	Sinaga, D. (2024). Teacher-Student Interaction Models: Effective Strategies for Increasing Student Participation and Motivation.	Kuantitatif eksperimen (model)	Interaksi yang adaptif dan berbasis umpan balik meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa.	Memberi dasar empiris pada hubungan interaksi gurusiwa ( $X_2$ ) dengan kepuasan belajar ( $Y$ ).
8.	Putri, S. P., Pratama, H., & Fitriati, S. W. (2023). Explanatory Study of Student-Teacher Interactions, Students' Academic Motivation, and Teacher's	Memberi dasar empiris pada hubungan interaksi guru-siswa (X <sub>2</sub> ) dengan kepuasan belajar (Y).	Komunikasi guru yang terbuka meningkatkan motivasi akademik dan kenyamanan belajar siswa.	Relevant untuk mendukung dimensi komunikasi dan dukungan emosional pada variabel X <sub>2</sub> .

No	Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian ini
Motivation in English Classes.				
9.	Gebre, Z. A., Demissie, M. M., & Yimer, B. M. (2025). The impact of teacher socio-emotional competence on student engagement: a meta-analysis.	Meta-analisis	Kompetensi sosial-emosional guru meningkatkan keterlibatan dan kepuasan siswa.	Menjadi dukungan teoritis global terhadap hubungan interaksi gurusiwa (kepuasan siswa).
10.	Handika, T. D., & Yudhistira, A. (2025). Analisis Kepuasan Siswa terhadap Fasilitas Sekolah di SMP Negeri 1 Gedung Surian menggunakan Metode CSI dan IPA.	Kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance-Performance Analysis (IPA).	Kepuasan siswa terhadap fasilitas sekolah berada pada kategori puas (CSI 81,5%), tetapi masih perlu peningkatan pada dimensi kebersihan dan sarana belajar.	Memberi indikator empirik konkret untuk variabel Y (Kepuasan Siswa) pada jenjang SMP negeri.

Dari berbagai penelitian yang tertera pada Tabel 1, kajian tentang sistem zonasi PPDB dan interaksi guru-siswa telah menghasilkan beragam temuan penting, baik dari sisi implementasi kebijakan maupun dari aspek proses pembelajaran di kelas. Secara umum, studi terdahulu menegaskan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap pemerataan akses dan persepsi keadilan pendidikan, sedangkan interaksi guru-siswa berperan dalam membentuk motivasi, keterlibatan, dan kenyamanan belajar siswa. Meskipun demikian, penelitian yang menghubungkan kedua variabel tersebut secara simultan dalam menjelaskan kepuasan siswa sebagai bentuk evaluasi layanan pendidikan masih jarang dilakukan, terutama pada konteks sekolah menengah pertama. Sebagian besar penelitian terdahulu berdiri pada ranah

masing-masing tanpa melihat bagaimana keduanya berinteraksi dalam membentuk pengalaman belajar siswa.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menguji pengaruh simultan sistem zonasi PPDB dan interaksi guru-siswa terhadap kepuasan siswa, yang belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga mengadaptasi SERVQUAL untuk konteks SMP Negeri yang terdampak zonasi, sehingga memberikan perspektif baru pada penilaian mutu layanan pendidikan. Selain itu, penelitian ini menyusun model hipotetik baru yang mengintegrasikan kebijakan zonasi dan dinamika pembelajaran sebagai penentu kepuasan siswa.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis untuk menjembatani dua ranah tersebut, dengan menguji secara empiris pengaruh sistem zonasi PPDB ( $X_1$ ) dan interaksi guru-siswa ( $X_2$ ) terhadap kepuasan siswa (Y) SMP Negeri di Kota Bogor. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti baru yang lebih komprehensif tentang hubungan antara kebijakan pendidikan dan dinamika interaksi guru-siswa di tingkat satuan pendidikan.

